

**SKRIPSI**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PADABADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE**



**OLEH:**

**SITI NURFATIRAH ISMAIL  
NIM:2020203861211051**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE**



**OLEH**

**SITI NURFATIRAH ISMAIL  
NIM: 2020203861211051**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
PADA Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

ii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Siti Nurfatirah Ismail

NIM : 2020203861211051

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.80/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19890608 201903 2 015

Pembimbing Pendamping : Ismayanti, M.M. (.....)

NIP : 198106212023212018

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Muhammad Han Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 1971 0208 2001 12 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Siti Nurfatihah Ismail

NIM : 2020203861211051

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.80/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.	(Ketua)	
Ismayanti, M.M.	(Sekretaris)	
Prof. Dr. Hannani, M.Ag	(Anggota)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muhammadan Muhammadun, M.Ag  
NIP. 1971 0208 2001 12 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Murni dan Ayahanda Ismail yang memberikan dukungan secara moral dan maupun materil, terima kasih untuk hari-hari yang telah kau habiskan untuk menjaga, menyayangi, mendidik dan membimbing serta selalu mendoakan penulis. Serta Saudaraku Siti Rasyidah Ismail yang telah memberikan dukungan serta doa agar penulis terus semangat dan menyelesaikan perkuliahan. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk orang tua dan saudaraku.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M dan ibu Ismayanti, M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Dan juga Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M., dan bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. sebagai ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Darwis, S.E., M.Si. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
7. Saudara saya Siti Rasyidah Ismail, kakak/adik sepupuku dan keluarga lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah memberikan saya motivasi dan semangat untuk meneruskan kuliah saya hingga saya berada di titik ini.
8. Sahabat saya Nanda, Arfah, Risdah, Rara yang selalu memberikan semangat disetiap prosesku selama 11 tahun terakhir ini, tidak bosan mendengar keluh kesahku selama ini.



9. Teman seperjuanganku Yuliana salim, Hannisa Zahlam yang telah berjuang bersama-sama dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
10. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Keuangan Syariah, PPL, KKN Reguler 34 Posko 40Desa Dulang Kabupaten Enrekang Tahun 2023, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang menemani penulis untuk melaksanakan perkuliahan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 11 April 2024  
02Syawal 1445 H

Penulis

SITI NURFATIRAH ISMAIL  
NIM 2020203861211051

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurfatirah Ismail  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861211051  
Tempat/ Tgl.Lahir : Pinrang, 01Mei 2003  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap  
Kinerja Keuangan Pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 11 April 2024

Penyusun,

Siti Nurfatirah Ismail  
NIM.2020203861211051



## ABSTRAK

Siti Nurfatirah Ismail, *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene* (dibimbing oleh Nurfadhilah dan Ismayanti).

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang instansi atau perusahaan capai dalam kegiatan operasionalnya yang menyangkut aspek keuangan. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat menggunakan suatu ukuran tertentu yaitu rasio, dari penilaian dasar tersebut akan terlihat bagaimana instansi daerah tersebut mengelola anggaran dana yang mereka miliki dan akan menjadi patokan apakah instansi tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik atau buruk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan dalam mengumpulkan dan menggunakan teknik dokumentasi dan observasi dengan analisis kinerja keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, dan melakukan tinjauan terhadap pengelolaan keuangan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene pada tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dikatakan efektif yang diukur dengan rasio efektivitas pengguna rumah tangga, dengan rasio keseluruhan mencapai 94%. Analisis tingkat efisiensi BAPPEDA menunjukkan Kabupaten Majene menggunakan anggarannya dengan sangat efisien yaitu sebesar 43% pada tahun 2019 hingga 2022. Dari analisis varians pengeluaran pada tahun 2019 hingga 2022, secara keseluruhan perbandingannya baik yaitu sebesar 94%, namun berdasarkan analisis harmonisasi belanja pada tahun 2019 hingga 2022, BAPPEDA Kabupaten Majene kurang memberikan perhatian karena total belanja tidak langsung sebesar 56% dan belanja langsung sebesar 43%. Alokasi anggaran. Kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene telah sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan syariah yang tertuang dalam Tinjauan Pengelolaan Keuangan Syariah.

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Manajemen Keuangan Syariah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB IPENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Anggaran.....	15
2. Analisis Kinerja Keuangan.....	17
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	22
4. Analisis Rasio Keuangan.....	26
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	32
6. Anggaran Sektor Publik .....	38
7. Manajemen Keuangan Syariah .....	39

C.	Kerangka Pikir Konseptual.....	43
BAB II METODE PENELITIAN .....		44
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
C.	Populasi dan Sampel .....	44
D.	Jenis dan Sumber Data .....	45
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	46
F.	Definisi Operasional Variabel .....	47
G.	Instrumen Penelitian.....	48
H.	Teknik Analisis Data.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		53
A.	Deskripsi Hasil Penelitian .....	53
B.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
BAB IV PENUTUP .....		82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....		85
LAMPIRAN .....		88
BIOGRAFI PENULIS .....		96

**DAFTAR TABEL**

<b>No Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene Tahun 2019-2022	8
2.1	Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja	28
2.2	Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja	29
2.3	Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja	30
2.4	Kriteria Kinerja Keserasian Belanja	31
3.1	Definisi Operasional Variabel	48
3.2	Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja	50
3.3	Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja	51
3.4	Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja	52
3.5	Kriteria Kinerja Keserasian Belanja	53
4.1	Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA	55
4.2	Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2019-2022	59
4.3	Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019-2022	61
4.4	Rasio Varians Belanja Tahun Anggaran 2019-2022	63
4.5	Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah BAPPEDA Kabupaten Majene	66
4.6	Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2019-2022	67
4.7	Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2019-2022	69
4.8	Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019-2022	70
4.9	Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene	74

## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	44



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No Tabel</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1.	Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene Tahun 2019	89
2.	Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene Tahun 2020	90
3.	Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene Tahun 2021	91
4.	Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene Tahun 2022	92
5.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	93
6.	Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIEN Parepare	94
7.	Surat izin meneliti dari kampus untuk PTSP	95
8.	Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Majene	96
9.	Surat Izin Meneliti dari Pemerintah Kabupaten Majene	97
10.	Surat dari PTSP	
11.	Surat Keterangan telah meneliti dari Instansi BAPPEDA Kabupaten Majene	98
12.	Dokumentasi	99
13.	Biodata Penulis	100

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَحْنَيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْم : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَة	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَة	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta ‘murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
سَيِّئٌ	: syai ‘un
أَمِرْتُ	: umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:



ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

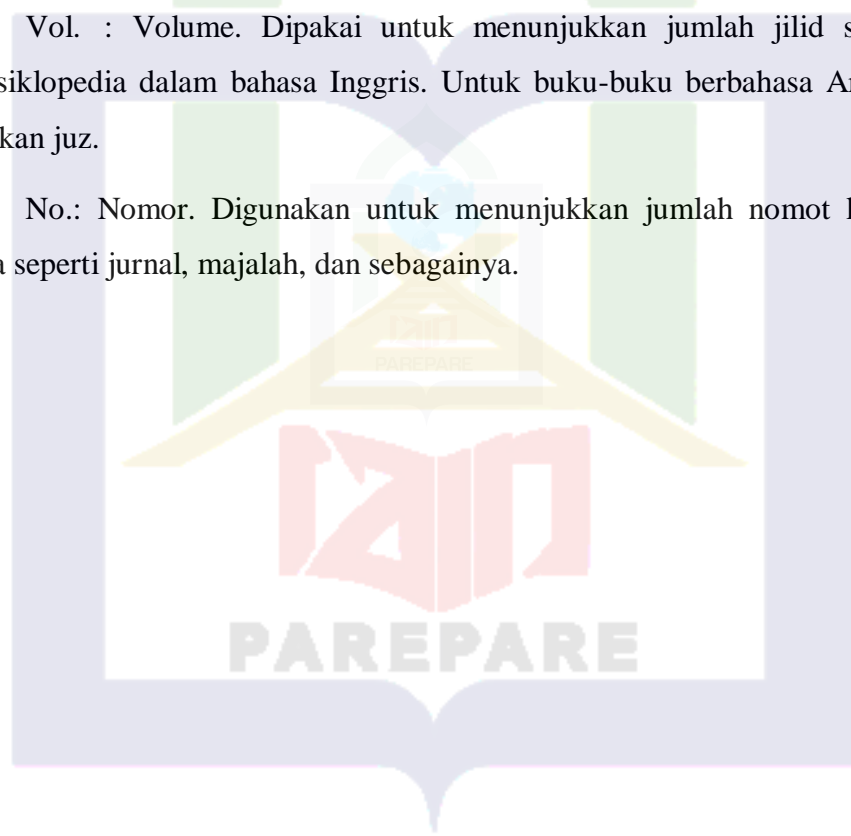
et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene (Bappeda) melaksanakan rencana strategi dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekreariat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintah, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan khususnya di bidang pemerintahan, dalam hal ini kesemuaaspek yang ada dalam proses pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja daerah agar terlaksana.

Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi daerah), dana perimbangan (bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), dan lain-lain pendapatan yang sah (hibah, dana darurat dan lainnya). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene tahun 2022 mengalami penurunan besar 7,88%, dimana PAD tahun 2021 sebesar 7,88

miliar rupiah menjadi 2,23 miliar rupiah pada tahun 2022. Dari tiga sumber pendapatan daerah yang diterima pemerintah semuanya mengalami penurunan, dana perimbangan merupakan pendapatan yang paling besar penurunannya pada tahun 2021 mencapai 776 miliar, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada sama sekali dana perimbangan yang masuk sebagai pendapatan pemerintah Kabupaten Majene.

Pendapatan daerah Kabupaten Majene secara keseluruhan pada tahun 2022 menurun sebesar 99,57%, dari 805,22 miliar rupiah menjadi 3,46 miliar rupiah. Penurunan ini tentunya disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber pendapatan yang telah disebutkan sebelumnya. Dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah Kabupaten Majene, terlihat dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi paling kecil sedangkan dana pendapatan asli daerah kontribusinya paling besar.<sup>1</sup>

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Majene adalah menetapkan target dari penerimaan daerah yang ada setiap tahunnya. Penerimaan daerah dapat berupa pajak, retribusi daerah, maupun bagian laba BUMD. Dari target yang ditetapkan ini dapat diukur besarnya pencapaian kinerja yang sudah dilaksanakan berdasarkan realisasi yang didapat.

Realisasi pemerintah daerah di tahun 2022 sudah cukup baik, yakni telah mencapai lebih dari 100% yang ditargetkan. Terdapat beberapa item penerimaan yang melebihi target seperti retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi jasa pelayanan tera, retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi izin mendirikan bangunan. Akan tetapi, masih banyak komponen yang penerimaannya kurang dari 50% yang ditargetkan oleh pemerintah, yakni seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi izin proyek. Untuk pajak banyak komponen yang realisasinya yang di bawah 50% hanya penerimaan dari pajak hiburan. Dari bagian laba dan pos lain-lain yang realisasinya dibawah 50% adalah hasil penjualan milik daerah dan pendapatan bunga

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Majene, “ *Statistik Daerah Kabupaten Majene 2023*”, (Majene: BPS Majene, 2023).

deposito. Sementara untuk pendapatan bagi hasil pajak nilainya sudah di atas 50% semua.<sup>2</sup>

Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi secara positif di Kabupaten Majene, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,39%. Hal ini diakibatkan oleh sumbangsih dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan kategori yang paling mencirikan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Pertumbuhan PDRB selama periode 2021-2022 menurut lapangan usaha memiliki angka yang sangat bervariasi. Dari 17 lapangan usaha terdapat tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, sedangkan 14 kategori lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative yaitu yang cukup signifikan perubahannya adalah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, kategori yang mengalami pertumbuhan positif yang paling besar yaitu pada kategori pengadaan listrik dan gas. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative yaitu yang cukup signifikan perubahannya adalah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, kategori yang mengalami pertumbuhan positif yang paling besar yaitu pada kategori pengadaan listrik dan gas.

Kontribusi setiap sektor lapangan usaha terhadap PDRB di Kabupaten Majene cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kontributor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Majene konsisten dipegang oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Kabupaten Majene berprofesi sebagai petani dan nelayan sehingga produksi di sektor ini selalu besar. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha perikanan adalah lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Majene yaitu sebesar 37,74%.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Refo Aulia Alba, “Indikator Ekonomi Kabupaten Majene Tahun 2022”, (Majene: BPS Kabupaten Majene, 2022).

<sup>3</sup> Refo Aulia Alba, “Indikator Ekonomi Kabupaten Majene Tahun 2022”, (Majene: BPS Kabupaten Majene, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1, menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menyebutkan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD.<sup>4</sup> Secara umum bahwa anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut.<sup>5</sup>

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah bagaimana cara pemerintah daerah khususnya Bappeda memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik.<sup>6</sup> Dan pengukuran kinerja keuangan pada Bappeda ini lebih terfokuskan kepada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintah tidaklah sama dengan perhitungan dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi-instansi perusahaan. Dalam hal ini sangatlah penting bagi Bappeda dalam melakukan berbagai penetapan dalam analisis penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun semaksimal mungkin sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengambilan suatu kebijakan, baik pengalokasian, distribusi sumber daya yang harus dikembalikan kemasyarakat umum, sehingga bisa menciptakan ekonomis, efektif dan efisien dalam menggunakan belanja daerah dengan *output* dan *income* yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,” (Jakarta: 2006).

<sup>5</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA

<sup>6</sup> Gede Edy Prasetya, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2005)

dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas. Laporan Keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak yang bekepentingan. Bahkan organisasi pemerintahpun, sekarang ini sedang berupaya untuk menerapkan konsep-konsep akuntansi pada pola manajemennya untuk tujuan pertanggungjawaban kegiatan.<sup>7</sup> Dalam penganggaran apabila tidak terencana secara teukur maka anggaran dapat dengan mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, dalam penganggaran pemerintah terutama pemerintah daerah harus ada transparansi yang jelas kemana saja anggaran dan belanja itu dikeluarkan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat dijadikan sebaai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pada Bappeda Kabupaten Majene pada periode berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene sebaai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintah dalam perencanaan pembangunan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Bappeda dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mambantu memperbaiki kinerja pemerintah yang befokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kineja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

---

<sup>7</sup> Andi Ayu Frihatni, *Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah*, (Purbalingga: CV Aurika Media Aksara, 2022)

kelembagaan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.<sup>8</sup>

Penggunaan rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan, tidak seperti pada lembaga perusahaan yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan ketebatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat komersial. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi atau struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *Incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu, oleh karena itu sering mengabaikan rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penilaian keberhasilan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai penilaian pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Nya.

Pengukuran kinerja keuangan ini dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan laporan yang menyajikan perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah digambarkan dalam tahun anggaran tertentu. Pada dasarnya laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

---

<sup>8</sup> Juddy Julian Pilat, *analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, kota manado tahun anggaran 2011-201*. Jurnal Accountabilit. Vol 06 No 01, 2017, h. 46



daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran.<sup>9</sup>

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Anggaran merupakan alat penting sebagai perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

Pengukuran tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tapi relatif. Maka pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi belanja. Pengukuran Kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efektifitas belanja daerah yang digunakan oleh instansi. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Maka dalam melakukan pengukuran kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pedoman yang digunakan adalah Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 karena peraturan tersebut mengukur kinerja pemerintah dari segi keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dengan menilai Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Analisis Varians Belanja terhadap realisasi anggaran-Nya.

---

<sup>9</sup> Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2015), h. 121

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran**  
**BAPPEDA Kabupaten Majene Tahun 2019-2022**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	7.802.324.059	7.665.784.789
2020	5.051.620.209	4.816.914.997
2021	6.072.699.096	6.052.240.226
2022	4.875.779.375	4.068.694.314

Sumber : Bappeda Kabupaten Majene

Data diatas menyatakan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 98,25% turun menjadi 95.35% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 realisasi anggaran kembali mengalami kenaikan 99,66%, kemudian kembali turun pada tahun 2022 dengan penggunaan anggaran 83,44%. Dan adapun selisih dari realisasi anggaran setiap tahunnya dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Majene. Seluruh perubahan penurunan dan kenaikan realisasi anggaran tersebut perlu untuk di kaji secara penelitian karena setiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Majene mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap, Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan pemerintah daerah terhadap anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene dalam hal ini akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran. Karena terdapat beberapa hambatan yang menjadi sistem dari penyusunan Laporan Realisasi Anggaran karena tekad yang menjadi acuan

penganggaran ada yang belum bisa dikelola. Dari uraian diatas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan, Berdasarkan uraian permasalahan diatas, menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Laporan Realisasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Analisis Laporan Realisasi Anggaran terhadap Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. Adapun sub permasalahannya antara lain yaitu :

1. Apakah kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Majene dari Tahun 2019-2022?
2. Apakah penggunaan anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene telah memprioritaskan belanjadari Tahun 2019-2022?
3. Bagaimana tinjauan Manajemen Keuangan Syariah atas Kinerja Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan realisasi Anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Majene dari Tahun 2019-2022
2. Untuk mengetahui keseimbangan penggunaan anggaran dalam memprioritaskan belanja pada BAPPEDA Kabupaten Majene dari Tahun 2019-2022

3. Untuk mengetahui tinjauan Manajemen Keuangan Syariah atas Kinerja Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan maupun referensi bagi penggunaannya sebagai sumber informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang merealisasikan anggaran agar tetap Efektif dan Efisien.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi khususnya kinerja keuangan daerah.
- b. Bagi BAPPEDA, sebagai tambahan bahan referensi dan bahan masukan dalam menganalisis kinerja keuangan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene dan sebagai alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan pemerintah demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
- c. Bagi Masyarakat, Hasil Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang kinerja keuangan yaitu tingkat Efektifitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini mencakup tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat juga perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa jurnal atau skripsi yang relevan dengan judul proposal skripsi penelitian.

1. Wico Jontarudi Tarigan, Mahaitin H Sinaga, Ripka Seriidahnaita Ginting, Mengenai Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar, 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian : selisih pengeluaran tahun 2016 sebesar 90,99 %, tahun 2017 sebesar 92,42 %, tahun 2018 sebesar 82,26 %, tahun 2019 sebesar 99,00 %, dan tahun 2020 sebesar 81,11 % yang menunjukkan adanya pengurangan anggaran dibelanjakan karena tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Namun berdasarkan rasio efisiensi, realisasi anggaran tahun 2016 – 2017 dapat dikatakan cukup efisien, namun pada tahun 2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran kurang efisien namun masih dinilai baik karena hanya tersisa 1 % dari anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar dilaporkan cukup baik berdasarkan kajian pertumbuhan belanja, karena terjadi peningkatan belanja dari tahun 2016 ke 2020, dengan nilai maksimal 36,41 % pada 2019 – 2020 dan minimal sebesar 2,14% pada tahun 2017 – 2018. Prioritas belanja Bappeda Kota Pematangsiantar pada tahun 2016 - 2020 lebih memprioritaskan belanja operasi dengan nilai

maksimal 99,04 % bila dibandingkan dengan belanja modal dengan nilai minimal 0,96 % pada tahun 2017. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan variabel realisasi anggaran dan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup>

2. Muh Ilham Gusman, Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Parepare, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan pengeluaran anggaran terhadap efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dari Tahun 2019-2021, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena. Berdasarkan hasil penelitian: Laporan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota parepare Tahun 2019-2021 menunjukkan jumlah penerimaan yang fluktuatif dan laporan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota parepare Tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan, meskipun realisasi belanja pada tahun 2020 tergolong kurang efisien dengan angka persentase rasio efisien yang cukup tinggi yaitu 98,22% namun jumlah persentase rasio efisien tersebut belum 100% (tidak efisien) yang artinya secara keseluruhan pengeluaran pemerintah Parepare rata-rata masih tergolong cukup baik. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada analisis data dan sampel penelitian, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi dan sampel penelitian yaitu laporan realisasi anggaran, sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada pendekatan penelitian dan juga analisis data yaitu pendekatan penelitian ini kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu kualitatif, analisis data, penelitian ini

---

<sup>10</sup> Wico Jontarudi Taringan, Mahaitin H Sinaga, Ripka Seriidahnaita Ginting, "Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar"5,no. 1 (2023).

menggunakan analisis varians belanja dan keserasian belanja sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan analisis rasio tersebut.<sup>11</sup>

3. Aditya Kusuma Rachman, Siddig Alamsyah, Kumba Digdowiseiso, *Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, 2023*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan menganalisis data menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian keuangan daerah, rasio pertumbuhan keuangan daerah dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian : Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah pemerintah Daerah Kepulauan Maranti yang dilakukan pada periode tahun anggaran 2017-2021 diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan hubungan pola yang Instruktif, Rasio Keserasian Keuangan Daerahnya terdapat ketimpangan pada Belanja Operasional dan Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami kondisi negative, dan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan dominan berada di tingkat rendah yakni di bawah 100% atau tidak efektif. Berdasarkan temuan tersebut disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dengan adanya fungsi desentralisasi fiskal. Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan analisis data rasio efektifitas dan efisiensi belanja sedangkan perbedaannya yaitu, Penelitian ini juga menggunakan Analisis varians belanja untuk menilai kinerja keuangan di BAPPEDA Kabupaten Majene sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan analisis varians belanja.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muh Ilham Gusman, *“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Parepare”*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIEN Parepare, 2021.

<sup>12</sup>Aditya Kusuma Rachman, Siddig Alamsyah, Kumba Digdowiseiso, *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Maranti Tahun Anggaran 2017-2021”*4, no. 5 (2023).



4. Halkadri Fitra, Zahro Ilmi Efendi, *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, 2020*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Solok selatan periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan format deskriptif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data laporan keuangan menggunakan 10 indikator. Berdasarkan hasil penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah adalah 8,04% dengan kategori kemandirian sangat kurang, rasio ketergantungan keuangandaerah adalah 91,18% dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, derajat desentralisasi keuangan daerah 7,32% dengan kategori derajat desentralisasi sangat kurang, varians total pendapatan Rp 11.434.995.893 dalam kategori yang tidak menguntungkan, pertumbuhan realisasi total pendapatan 5,45% dalam kategori yang baik, rasio efektivitas total pendapatan 98,57% berada pada kategori efektif, rasio efektivitas PAD adalah 102,13% berada pada kategori sangat efektif, rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja adalah 69,04%, rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja adalah sebesar 30,77% dan rasio efisiensi total belanja pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 92,75% dalam kategori kurang efisien. Persamaan Penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan analisis data rasio efektifitas, rasio efisiensi dan keserasian belanja sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan analisis varians belanja sedangkan penelitian terdahulu menggunakan rasio kemandirian, desentralisasi, dan rasio ketergantungan.<sup>13</sup>
5. Arif Budianto, *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026-2020, 2021*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Magelang periode 2016-2020. Analisa kinerja keuangan ini dilakukandengan menggunakan analisa rasio seperti

---

<sup>13</sup> Halkadri Fitra, Zahro Ilmi Efendi, “*Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan*” xiv, no. 01 (2020).

derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektif pendapatan, rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian: diperoleh hasil bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Magelang memiliki hubungan yang instruktif. Dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai rasio efektivitas sebesar 97,37%. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Magelang masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Persamaan Penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan analisis data Rasio efektifitas sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan rasio kemandirian sedangkan penelitian ini tidak menggunakan rasio kemandirian.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Anggaran**

#### **a. Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (Budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan priodik (biasanya dalam periode satu tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (Pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Arif Budiarto, "Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020" (2021).

<sup>15</sup> Munandar, *Budgeting*, Edisi Pert (Yogyakarta: BPFE, 2020). h. 55

#### b. Fungsi Anggaran

Keberhasilan pemerintah tidak mungkin tercapai jika tidak memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan tercerminkan pada sistem penganggaran yang baik dan terkoordinasi. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan untuk masa yang akan datang, sedangkan pengendalian merupakan alat untuk memastikan dan menjamin bahwa seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

#### c. Manfaat Anggaran

Adapun tiga fungsi anggaran yaitu sebagai alat pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan.

- 1) Anggaran sebagai rencana kerja, yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan atas masa depan. Anggaran merupakan aspek perencanaan yang penting, menggunakan dana (sumber daya) yang tersedia seefisien mungkin. Hal ini dilakukan karena dana merupakan sumber daya yang langka dan sudah menjadi kebiasaan bahwa dana yang dibutuhkan melebihi yang tersedia. Maka dari itu anggaran harus disusun secara teliti dan efisien sehingga mampu menjadi suatu petunjuk bagi setiap pelaksanaannya dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Anggaran sebagai alat koordinasi, pada sektor ekonomi perusahaan koordinasi merupakan usaha agar semua bagian dalam perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, Anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan keselarasan dalam tindakan, sehingga tercipta pula keselarasan tujuan. Tindakan dalam hal ini kegiatan perusahaan yang kebutuhan dananya tercantum dalam anggaran, yang telah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan yang berwenang (dalam hal keuangan). Kegiatan akan disetujui apabila tidak menyimpang dari anggaran dan

tujuan perusahaan. Maka dari itu, anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi mampu menyelaraskan kegiatan dan tujuan perusahaan.

- 3) Anggaran sebagai alat pengawasan, pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pencapaian hasil dan perencanaan aktivitas.<sup>16</sup>

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya merupakan bentuk dari pengawasan tersebut. Melalui perbandingan tersebut dapat dilihat seberapa jauh *slack* (perbedaan) dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran dalam periode berikutnya.

## 2. Analisis Kinerja Keuangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>17</sup>

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda setiap bagian, kemudian hubungannya antara satu dengan yang lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

---

<sup>16</sup> Munandar, *Budgeting*, Edisi Pert (Yogyakarta: BPFE, 2020). h. 56

<sup>17</sup> Perpustakaan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Semaran: Widya Karya, 2010), h. 43

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya, digunakan sebagai alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang, sebagai proses diagnosa terhadap masalah-masalah manajemen, operasi, atau masalah lainnya.<sup>18</sup>

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.<sup>19</sup>

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektivitas yang berkaitan dengan produktifitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup> Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seseorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi.

Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggung jawab tugas yang dibeikan.

Menurut Sudarmanto, kinerja merupakan cetatan hasil yang di produksi atau fungsi pekerjaan tetentu atau aktivitas selama periode waktu tetentu. Sebagai perilaku kinerja juga merupakan sepangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Arfan Ikhsan dkk, *Analisis Laporan Keuangan*, (Medan: Madanetra, 2012). h. 43

<sup>19</sup> Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009). h. 5

<sup>20</sup> Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2002). h.

<sup>21</sup> Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 8

Sedangkan kinerja dalam pandangan islam dituangkan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Ahqaf/46:19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.<sup>22</sup>

Ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bai organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Penilaian suatu kinerja maka dilakukan dengan pengukuran terhadap kinerja, untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Dan yang lebih penting adalah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.<sup>23</sup> Pengukuran kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan kinerja sektor publik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat kecapaian organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi publik digunakan untuk mengetahui ketecapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketecapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi bejalan sesuai arah dari tujuan yang

<sup>22</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), h. 502

<sup>23</sup> Dedi Nordiawan, et, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 158

ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan dengan cepat.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi serta mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer itu, diperlukan perbaikan kinerja secara terus menerus.

d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman.

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan penghargaan, misalnya: kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi. Atau hukuman, misalnya: pemutusan kerja, penundangan promosi dan teguran.<sup>24</sup>

Perencanaan pembangunan dalam kinerja pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>24</sup> Dedi Nordiawan, et, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 157-159



a. Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun sebagaimana diteapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sedangkan dewasa ini rencana pembangunan jangka panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Bahkan masih ada jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pembangunan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jangka panjang biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh kedepan tentang kerangka pembangunan yang disusun sesuai aspirasi masyarakat secara umum. Perencanaan jangka panjang lebih bersifat makro (menyeluruh) dan tidak sampai kepada program dan kegiatan secara rinci. Sedangkan aspek yang dibahas meliputi bidang ekonomi, social-budaya, dan tata ruang. Disamping itu dalam perencanaan jangka panjang juga mencakup pertahapan pembangunan untuk masing-masing periode lima tahunan. Hal ini perlu dilakukan agar perencanaan jangka panjang tersebut dapat menjadi acuan terhadap penyusunan perencanaan jangka menengah.

b. Perencanaan jangka menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif agar perencanaan



tersebut menjadi lebih teukur dan muda dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.<sup>25</sup>

c. Perencanaan jangka pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering dinamakan rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<sup>26</sup>

### 3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batasan-batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Syafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 24

<sup>26</sup> Syafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 25

<sup>27</sup> Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, (Jakarta: CV Rajawali, 2013), h. 199

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>28</sup>

Agama islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam menganjurkan orang beramal dan berusaha. Pada umumnya semua pekerjaan memerlukan pengembangan amanah yang teruji dalam hal kemampuan menjalankan pekerjaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

Firman Allah dalam Q.S. Al- Baqarah/2:151.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم  
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.<sup>29</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengutus kepada umat manusia seorang rasul yang akan mengajarkan kita baaimana umat manusia dapat menjalankan pekerjaan serta tanggung jawab yang diberikan. Serta mengajarkan kita apa yang belum kita ketahui sesuai dengan Al-kitab dan Al-Hikmah. Sehingga apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat bai kita dan orang lain.

<sup>28</sup> Hendro Sumarjo, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 55

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PTSigmaXamediaArkanleema, 2009), h. 23.

Pengertian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

a) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan pemerintah yang menyangkut data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu, ataupun usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengolaan pemerintah daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, dan akuntabel. Analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut akan menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan daerah selama periode yang dianalisis.

Prosedur dalam menganalisis kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

a. Data Laporan

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis instansi yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku.

b. Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

c. Membandingkan atau Mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui

kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.<sup>30</sup>

#### b) Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan.<sup>31</sup> Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi:

##### 1. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

##### 2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

##### 3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.

##### 4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang menceminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

---

<sup>30</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 121

<sup>31</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 122

#### 5. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

#### 6. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

#### c) Pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

### 4. Analisis Rasio Keuangan

#### a. Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Kasmir, rasio keuangan yaitu kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka-angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Kasmir, “*Pengantar Manajemen Keuangan*”, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 93

Sofyan menjelaskan mengenai rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya.<sup>33</sup>

Disimpulkan dari pernyataan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka keuangan yang ada dalam laporan keuangan dengan cara menghitung atau mengukur angka tersebut untuk mendapatkan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu.

#### b. Tujuan dan Manfaat Rasio Keuangan

Rasio keuangan memiliki tujuan dan manfaat, yaitu untuk dipergunakan untuk membandingkan rasio yang ada saat ini dengan rasio masa lalu maupun rasio yang akan datang dalam suatu perusahaan yang sama. Kemudian tujuan dan manfaat rasio keuangan yang digambarkan oleh Fahmi adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja keuangan.
- 2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan dimasa yang akan datang.
- 3) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi keuangan
- 4) Analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi.
- 5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penelitian bagi pihak *stakeholder* organisasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sofyan Syafri Harahap, “*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*”,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 297.

<sup>34</sup> Fahmi, “*Pengantar Manajemen Keuangan*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 51.

Analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah antara lain:

**a. Rasio Efektifitas Belanja**

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dari sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:<sup>35</sup>

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**

**Kriteria Penilaian Kinerja Efektifitas Belanja**

<b>Kriteria Efektivitas Belanja</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

*Sumber: Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik*

<sup>35</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 54

### b. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relative. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien. Rumus Pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**

#### **Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja**

<b>Kriteria Efektivitas Belanja</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup Efisien	81-90%
Kurang Efisien	91%-100%
Tidak Efisien	>100%

*Sumber: Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik*

### c. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Dalam hal belanja daerah

<sup>36</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 166.



terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi belanja. Apabila pemerintah tidak dapat melakukan efisiensi belanja maka dapat dikategorikan adanya indikasi dari kinerja keuangan belanja daerah yang kurang baik atau dikarenakan adanya jumlah realisasi belanja yang lebih besar dari jumlah anggaran yang ditargetkan.

Selisih realisasi belanja yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, *pertama* hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, *kedua* justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanahkan dalam anggaran. Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

**Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja**

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja**

<b>Kriteria Varians Belanja</b>	<b>Ukuran</b>
Baik	Realisasi Belanja $\leq$ Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $\geq$ Anggaran Belanja

*Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

<sup>37</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010), h. 157

Analisis Varians Belanja cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya.

#### **d. Analisis Keserasian Belanja**

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung dianggap tidak baik, demikian sebaliknya. Jika pegawai > 50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak baik, demikian pula sebaliknya.

Adapun kriterianya sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penilaian Keserasian Belanja**

<b>Kriteria Varians Belanja</b>	<b>Ukuran</b>
Baik	Belanja Langsung > Belanja tidak langsung
Kurang Baik	Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung

*Sumber: Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Analisis ini antara lain :

#### 1) Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis proporsi belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan

pengendalian anggaran. Belanja tidak langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja setiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja dalam Anggaran. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 2) Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis belanja langsung menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi pemerintah. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.<sup>38</sup>

Rasio Belanja Langsung ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

## 5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Dalam konteks daerah, laporan ini ditunjukkan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah

<sup>38</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010), h. 159

untuk menilai dan mengambil keputusan. Disini, sumber informasi adalah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Materi di dalamnya adalah kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai alat komunikasi informasi keuangan kepada para pemakai. Standar umum pelaporan keuangan tersebut merupakan pedoman penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut

Laporan keuangan tersebut berisi ringkasan dari suatu proses pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis dan implementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan baik masing-masing instansi, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.

#### 1. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang disajikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan pemerintah
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi

- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyariatkan
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.<sup>39</sup>

## 2. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

### a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

#### 1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemda dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori:

#### 1. Pendapatan asli daerah

Merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

---

<sup>39</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, h. 6

## 2. Dana perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.

## 3. Lain-lain pendapatan yang sah

Adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

## 2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.

### 1. Belanja Aparatur Daerah

Merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung, dan lain sebagainya.

### 2. Belanja pelayanan publik

Meupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.

### 3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

## 3) Pembiayaan

Pembiayaan Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Neraca

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 paragraf 38 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas, dan sebarang arus kas pada bendahara umum daerah. Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini menyampaikan ikhtisar pencapaian kinerja selama periode tertentu, kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan masing-masing perkiraan laporan keuangan dan informasi tambahan yang diperlukan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan

juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan.<sup>40</sup>

### 3. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

#### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

#### b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

#### c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang bekepentingan. Menurut SFAC No 4 (*Statement of Financial Accounting Concepts*) Bagi organisasi pemerintah tujuan laporan keuangan adalah:

a. Laporan keuangan organisasi pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai

---

<sup>40</sup> Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Alfabet, 2006), h. 196



pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

- c. Membeikan informasi yang bermanfaat bai penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- d. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi pemerintah selama satu periode, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
- e. Memberikan penjelasan untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.<sup>41</sup>

## 6. Anggaran Sektor Publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa definisi anggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mardiasmo , Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
2. Menurut Sugijanto dkk, Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.
3. Menurut Bastian, Anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

---

<sup>41</sup> Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 21

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja.

Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program-program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai pada perencanaan strategis dan perencanaan operasional selesai dilakukan. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, karena berkaitan dengan pemerintah untuk melayani dan menyejahterakan rakyat. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran.

## **7. Manajemen Keuangan Syariah**

### **a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah**

Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad- dauran*. Adapun secara istilah sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum.<sup>42</sup> Oleh karena itu, manajemen (*idarah*) merupakan aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengharapan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Yang bertujuan agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai cara yang efektif dan efisien.

---

<sup>42</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).h. 2.

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Maka setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Manajemen Keuangan Syariah menurut Muhammad diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah yang berkaitan dengan masalah perusahaan.<sup>43</sup>

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip syariah.

#### **b. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah**

Islam mewajibkan para pengguna dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur, dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyiban) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan, sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual untuk manusia. Maka para pengusaha dan para penguasa harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (condition sine qua non) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para penguasa dan pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Adapun Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### 1) Prinsip *Amar ma'ruf Nahi mungkar*

Arti *Amar ma'ruf Nahi mungkar* secara terminology adalah mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang munkar. Secara etimologi *amar* adalah perintah, ajakan, anjuran, himbuan bahkan juga berarti permohonan, *ma'ruf* artinya baik, layak, patut, *nahi mungkar* berarti melarang, mencegah, dan *mungkar* berarti durhaka.

<sup>43</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2014)

<sup>44</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

*Amar ma'ruf Nahi mungkar* juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang mungkar. Istilah di dalam syariat islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat.

## 2) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Kewajiban menegakkan kebenaran dalam manajemen keuangan syariah yaitu kita dituntut untuk berperilaku jujur dalam menjalankan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan berperilaku jujur salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى  
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>45</sup>

## 3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Keadilan dalam hukum islam meliputi berbagai aspek kehidupan, hubungan manusia dengan tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitar.

<sup>45</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>46</sup>

#### 4) Kewajiban Menegakkan Amanah

Amanah yaitu dapat dipercaya, pekerjaan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota dan atasan tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah swt.

Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/8:27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.<sup>47</sup>

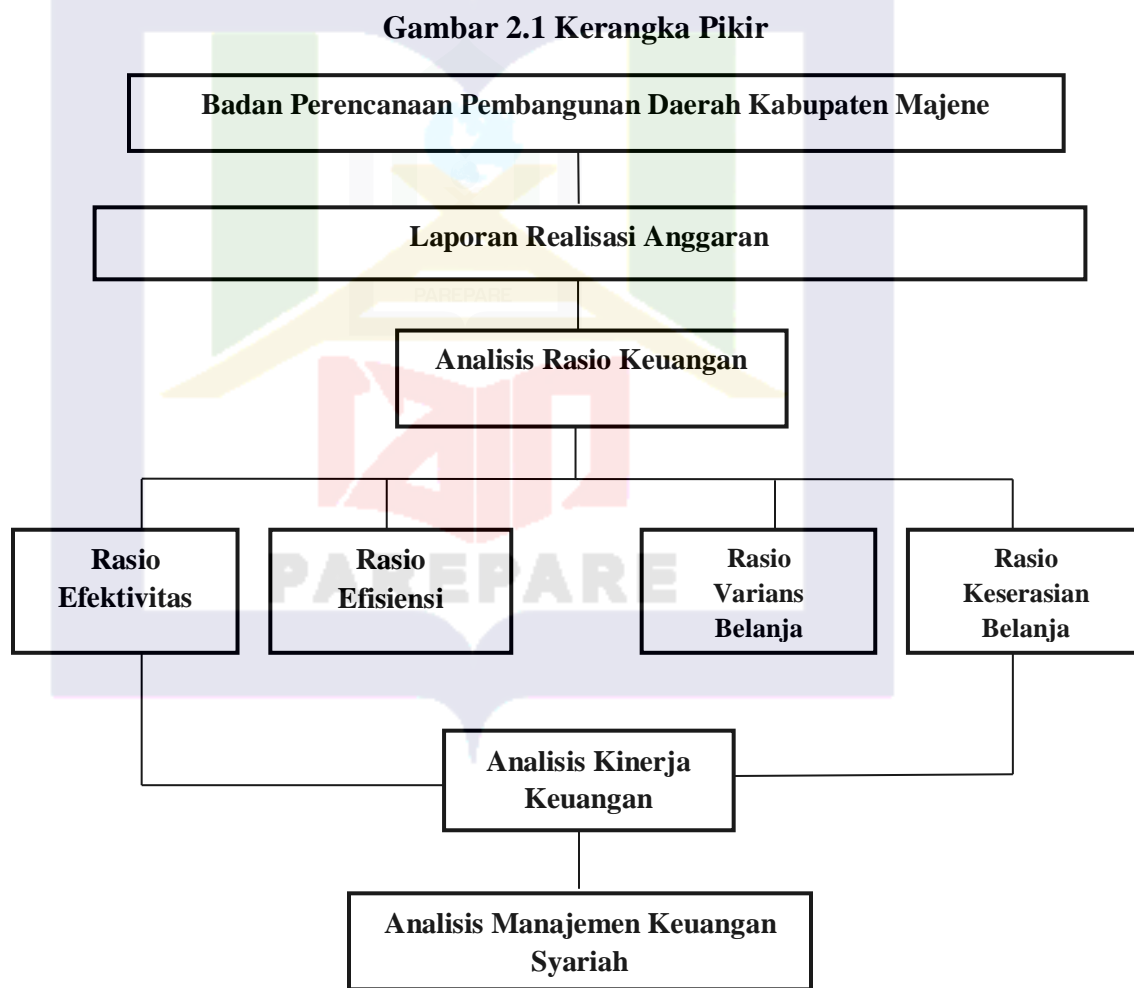
<sup>46</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

<sup>47</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

### C. Kerangka Pikir Konseptual

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antar konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian yang dikemukakan dalam bentuk skema atau diagram. Pada kerangka berfikir ini merupakan penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian akan lebih terstruktur. Penelitian ini menggunakan variabel Independen Realisasi Anggaran, Rasio Keuangan dengan variabel dependen Kinerja Keuangan.

Berdasarkan variabel yang telah disusun maka kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan format deskriptif. Penelitian Kuantitatif dengan jenis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dari masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi.<sup>48</sup> Pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan memberikan gambaran secara detail mengenai Hasil “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Majene”

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah., lokasi penelitian ini merupakan salah satu lokasi yang terletak di Jl Poros Majene-Mamuju, Pangali-Ali, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

---

<sup>48</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif “Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Prenda Media grup, 2005), h. 36.

untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya.<sup>49</sup>Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>50</sup>Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Majene.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka.

### 2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama.Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.<sup>51</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan,

---

<sup>49</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h.118

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 195

<sup>51</sup> Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2008). H. 65



skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>52</sup> Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran, data lain yang diperlukan dalam penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang hendak penulis teliti maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Mengamati fenomena alam dibantu oleh pengukuran sistematis, mengarah pada pengembangan teori dan hukum kekuatan alam. Observasi terus mengkarakterisasikan semua penelitian; descriptive eksperimental, dan historis

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen.<sup>53</sup> Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. Istilah documenter atau dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Alat pengumpulan datanya disebut form dokumentasi atau form pencatatan dokumen, sedangkan sumber

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 106

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 270.

datanya berupa catatan atau dokumen. Maupun dokumen ekstenal berisi bahan-bahan informasi berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan.

## F. Definisi Operasional Variabel

Variabel yaitu konsep yang mempunyai nilai dan dapat diukur. Kidder menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu kualitas dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel adalah penilaian terhadap orang maupun objek, atau kegiatan yang memiliki variasi yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>54</sup> Variabel dalam penelitian ini dibedakan dalam kategori utama yaitu Variabel bebas (*Independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

Definisi operasional variabel menjadi dasar dalam mengembangkan instrument penelitian, yaitu alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data.<sup>55</sup> Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variable-variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Realisasi Anggaran	Menurut Munandar (2012), Realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Tujuan realisasi anggaran adalah memberikan	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022

<sup>54</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 109.

<sup>55</sup> Muhammad Kamal Zubair and dkk, *PENULISAN KARYA ILMIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

		<i>feedback</i> serta <i>follow up</i> agar periode-periode berikutnya lebih baik lagi.	
2.	Rasio Keuangan	Menurut Brigham (2006), Rasio Keuangan merupakan suatu hubungan yang ditentukan dari informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Efektifitas Belanja</li> <li>2. Rasio Efisiensi Belanja</li> <li>3. Analisis Varians Belanja</li> <li>4. Analisis Keserasian Belanja</li> </ol>
2.	Manajemen Keuangan Syariah	Menurut Muhammad Manajemen Keuangan Syariah diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah yang berkaitan dengan masalah perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip <i>Amar ma'ruf Nahi munkar</i></li> <li>2. Kewajiban Menegakkan Kebenaran</li> <li>3. Kewajiban Menegakkan Keadilan</li> <li>4. Kewajiban Menegakkan Amanah</li> </ol>

### G. Instrumen Penelitian

Menurut Ibnu Hadjar bahwa instrument penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif, menilai atau mengukur fenomena yang akan diamati. Instrumen yang akan digunakan dalam riset ini yaitu studi pustaka dandokumentasi pada laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Majene yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019-2022.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.

### 1. Analisis Deskriptif

Digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.

### 2. Metode Analisis Data

#### a. Rasio Efektifitas Belanja

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud. Rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

#### Kriteia Penilaian Kinerja Efektifitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

Sumber: MAkuntansi Sektor Publik

### b. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relative. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien. Rumus Pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3.3**

#### **Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja**

<b>Kriteria Efisiensi Belanja</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup Efisien	81-90%
Kurang Efisien	91%-100%
Tidak Efisien	>100%

*Sumber: Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik*

### c. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.

<sup>56</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 54-56

Selisih realisasi belanja yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, *pertama* hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, *kedua* justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanahkan dalam anggaran. Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

**Tabel 3.4**

**Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja**

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja $\leq$ Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $\geq$ Anggaran Belanja

*Sumber: Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

**d. Analisis Keserasian Belanja**

Analisis Keserasian belanja merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010), h. 157

<sup>58</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010), h. 159

Adapun kriterianya sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kriteria Keserasian Belanja**

Kriteria Keserasian Belanja	Ukuran
Baik	Belanja Langsung > Belanja tidak langsung
Kurang Baik	Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung

*Sumber: Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Analisis keserasian belanja antara lain:

1. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis ini dilakukan untuk membandingkan belanja tidak langsung pada setiap fungsi terhadap total belanja dalam anggaran.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Tidak Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara total belanja langsung dengan total belanja yang ada pada realisasi. Analisis ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi yang sifatnya jangka pendek.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Majene**

Bappeda adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Barat dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majene penilaian atas pelaksanaannya. Badan berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan perda No. 4 Tahun 2001, Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas maka diperlukan sistem organisasi dan manajemen yang sangat baik.<sup>59</sup>

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Majene:

1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Organisasi dan Hukum
  - 4) Sub Bagian Kepegawaian
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Pertanian
  - 2) Sub Bagian Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
  - 3) Sub Bidang Koperasi dan Jasa
  - 4) Sub Bidang Industri, Sumber Daya Alam dan Kemaritiman
5. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan
  - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Komunikasi.
  - 3) Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Budaya.

---

<sup>59</sup>BAPPEDA KABUPATEN MAJENE



- 4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Perhubungan
    - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
    - 3) Sub Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air
    - 4) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan
  7. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
    - 2) Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati
  8. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pengumpulan Data Statistik.
    - 2) Sub Bidang Evaluasi
    - 3) Sub Bidang Informasi
    - 4) Sub Bidang Peragaan<sup>60</sup>

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas yaitu bagaimana cara pemerintah daerah khususnya Bappeda memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik.<sup>61</sup> Dan pengukuran kinerja keuangan pada Bappeda ini lebih difokuskan kepada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintah tidaklah sama dengan perhitungan dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi-instansi perusahaan, adapun analisis rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio varians belanja sesuai dengan analisis yang digunakan, maka data yang dibutuhkan yaitu berupa laporan keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene. Laporan keuangan yang

---

<sup>60</sup> BAPPEDA KABUPATEN MAJENE

<sup>61</sup> Gede Edy Prasetya, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2005)

peneliti gunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah.

## 2. Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene

Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**BAPPEDA Kabupaten Majene Tahun 2019-2022**

Uraian	2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Daerah</b>	7.802.324.059	7.665.784.789	5.051.620.209	4.816.914.997
<b>Belanja Operasional</b>	7.646.024.059	7.510.052.089	5.012.912.280	4.778.298.997
1. Belanja Pegawai	3.767.834.059	3.656.575.051	3.473.134.802	3.358.075.060
2. Belanja barang dan jasa	3.878.190.000	3.853.477.038	1.539.777.473	1.420.223.936
<b>Belanja Modal</b>	156.300.000	155.732.700	38.707.929	38.616.000

1. Peralatan dan mesin	77.150.000	76.866.350	38.707.929	38.616.000
2. Aset tetap lainnya	79.150.000	78.866.350	-	-
<b>Uraian</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Belanja Daerah</b>	6.072.699.096	6.052.240.226	4.875.779.375	4.068.694.314
<b>Belanja Operasional</b>	2.922.453.911	2.913.933.155	4.741.161.887	4.015.924.314
1. Belanja Pegawai	2.922.453.911	2.913.933.155	2.868.618.540	2.812.240.170
2. Belanja barang dan jasa	-	-	1.872.543.347	1.203.684.144
<b>Belanja Modal</b>	3.150.245.184	3.138.307.071	134.617.488	52.770.000
1. Peralatan dan mesin	3.150.245.184	3.138.307.071	109.332.488	52.770.000
2. Aset tetap lainnya	-	-	25.285.000	0.00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Majene

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam setiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Kabupaten Majene mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran

merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 7.802.324.059 dan Rp 7.665.784.789. Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional terjadi peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 7.646.024.059, dan untuk belanja modal jumlah anggarannya meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 3.150.245.184.

Jumlah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 7.802.324.059, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 7.665.784.789 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 5.051.620.209, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 4.816.914.997 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 6.072.699.096, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 6.052.240.226 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 4.875.779.375, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 4.068.694.314 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

### **1. Apakah Kinerja Keuangan Berdasarkan Realisasi Anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Majene dari Tahun 2019-2022**

Hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Majene dapat dilihat dari perhitungan tiga rasio yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio varians belanja :

- a.) Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Efektivitas Belanja

Rasio Efektivitas digunakan untuk membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran

yang dilakukan pemerintah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900-327 tahun 1996, kriteria efektivitas belanja sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : lebih dari 100%
- b. Efektif : 90-100%
- c. Cukup efektif : 80-90%
- d. Kurang efektif : 60-80%
- e. Tidak efektif : dibawah 60%

Rumus dan hasil perhitungan rasio efektifitas sebagai berikut dari tahun 2019 sampai tahun 2022:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{7.665.784.789}{7.802.324.059} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{4.816.914.997}{5.051.620.209} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{6.052.240.226}{6.072.699.096} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{4.068.694.314}{4.875.779.375} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efektivitas belanja dengan berdasarkan tabel 4.1, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Rasio Efektivitas Belanja**  
**Tahun Anggaran 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio Efektivitas</b>
2019	7. 802.324.059	7. 665.784.789	98%
2020	5.051.620.209	4. 816.914.997	95%
2021	6.072.699.096	6. 052.240.226	99%
2022	4. 875.779.375	4. 068.694.314	83%
<b>Total</b>	<b>23. 802.422.739</b>	<b>22. 603.634.326</b>	<b>94%</b>

*Data Hasil Olahan*

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2019-2022 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada instansi Bappeda Kabupaten Majene terus mengalami fluktuasi, yang artinya terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, terutama dalam penganggaran perwujudan dari realisasi anggaran itu sendiri. Tahun 2019 tingkat efektifitas dari anggaran belanja berada pada persentase 98% yang menunjukkan angka kisaran Rp 7.665.784.789, pada tahun ini anggaran dapat dikatakan efektif.

Tahun 2020 mengalami penurunan 3% dengan persentase sekitar Rp 4.816.914.997, penurunan ini juga diikuti penurunan realisasi anggaran. Meskipun mengalami penurunan tetapi tidak mengurangi nilai keefektivitasan pengguna anggaran pada instansi, di tahun ini dapat dikatakan pengguna anggaran efektif.

Tahun 2021 mengalami kenaikan kembali 4% yaitu dari 95% menjadi 99% dari realisasi anggaran Rp 6.052.240.226, merupakan tingkat kenaikan tertinggi dari tahun sebelumnya dan pada tahun ini pengguna anggaran dapat dikatakan efektif.

Tahun 2022 pengguna anggaran belanja sekitar 83% dengan kisaran Rp 4.068.694.314. Penurunan kembali terjadi pada tahun ini sekitar 6% dan penurunan ini

paling besar dari tahun sebelumnya yang hanya mengalami penurunan sekitar 3% di tahun 2020. Meskipun begitu pengguna anggaran di tahun ini dapat dikatakan cukup efektif, dari tahun 2019-2022 tingkat efektifitas dilihat dari total rasionya yaitu sebesar 94%.

$$\begin{aligned} \text{Total Rasio Efektivitas} &= \frac{22.603.634.326}{23.802.422.739} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

b.) Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja dan juga untuk melihat tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : Kurang dari 60%
- b. Efisien : 60%-80%
- c. Cukup efisien : 81%-90%
- d. Kurang efisien : 91%-100%
- e. Tidak efisien : lebih dari 100%

Rumus dan hasil perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{4.009.209.738}{7.665.784.789} \times 100\% \\ &= 52\% \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.458.839.936}{4.816.914.997} \times 100\% \\ &= 30\% \end{aligned}$$

Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{3.138.307.071}{6.052.240.226} \times 100\% \\ &= 51\% \end{aligned}$$

Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.256.454.144}{4.068.694.314} \times 100\% \\ &= 43\% \end{aligned}$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efisiensi dengan berdasarkan tabel 4.1, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Rasio Efisiensi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja Langsung</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>
2019	7. 665.784.789	4. 009.209.738	52%
2020	4. 816.914.997	1. 458.839.936	30%
2021	6. 052.240.226	3. 138.307.071	51%
2022	4. 068.694.314	1. 256.454.144	30%
<b>Total</b>	<b>22. 603.634.326</b>	<b>9.862.810.889</b>	<b>43%</b>

*Data Hasil Olahan*

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 52% dengan pengguna anggaran sekitar Rp 4.009.209.738, dari total anggaran yang ada dapat dikatakan jika pengguna anggaran pada tahun 2019 sangat efisien.

Pada tahun 2020 tingkat efisien pengguna anggaran berada pada persentase 30% dengan pengguna anggaran sekitar Rp 1.458.839.936, Tahun ini mengalami persentase



penggunaan anggaran sekitar 22%, maka pada tahun ini dapat dikatakan penggunaan anggaran sangat efisien.

Pada tahun 2021 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 51% dengan pengguna anggaran sekitar Rp 3.138.307.071, pada tahun ini terjadi kenaikan tingkat persentase efisien sebesar 51% dari tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan tahun ini sangat efisien.

Pada tahun 2022 tingkat efisiensi anggaran berada pada persentase 30% dengan pengguna anggaran sekitar Rp 1.256.454.144, pada tahun ini pengguna anggaran kembali naik 21% dari pengguna anggaran sebelumnya, maka dapat dikatakan pengguna anggaran tahun ini tetap sangat efisien. Dari tahun 2019-2022 tingkat efisiensi dilihat dari total rasionya yaitu sebesar 43%.

$$\begin{aligned} \text{Total rasio efisiensi} &= \frac{9.862.810.889}{22.603.634.326} \times 100\% \\ &= 43\% \end{aligned}$$

Tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Majene tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2019-2022 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka dibawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi 60% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk 4 tahun tersebut. Dengan demikian BAPPEDA Kabupaten Majene telah berhasil memenuhi tingkat yang sangat efisien anggaran belanja melalui program-program yang ada dan telah dijalankan.

c.) Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia ditahun anggaran tersebut. Kriteria dalam perhitungan analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

- a. Baik : Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
- b. Kurang baik : Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Rumus dan hasil perhitungan rasio varians belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja} &= 7.665.784.789 - 7.802.324.059 \\ &= (136.539.270) \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja} &= 4.816.914.997 - 5.051.620.209 \\ &= (234.705.212) \end{aligned}$$

Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja} &= 6.052.240.226 - 6.072.699.096 \\ &= (24.541.130) \end{aligned}$$

Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja} &= 4.068.694.314 - 4.875.779.375 \\ &= (807.085.060) \end{aligned}$$

**Tabel 4.4**  
**Analisis Varians Belanja**  
**Tahun Anggaran 2019-2022**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran	Varians Belanja	Perbandingan
2019	7.802.324.059	7.665.784.789	(136.539.270)	98%
2020	5.051.620.209	4.816.914.997	(234.705.212)	95%
2021	6.072.699.096	6.052.240.226	(24.541.130)	99%
2022	4.875.779.375	4.068.694.314	(807.085.060)	83%
<b>Tota</b>	<b>23.802.422.739</b>	<b>22.603.634.326</b>	<b>1.202.870.672</b>	<b>94%</b>

*Data Hasil Olahan*

Tahun 2019 penyerapan pengguna anggaran yang terdapat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp 136.539.270 atau sekitar 98% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan 2% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi, maka dari itu dapat dikatakan kinerjanya baik.

Pada tahun 2020 penyerapan pengguna anggaran yang terdapat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp 234.705.212 atau sekitar 95%, dimana tingkat persentase pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi tidak diikuti dengan penurunan tingkat nominalnya. Terdapat selisih perbandingan persentasenya sebesar 5%, maka dapat dikatakan baik.

Pada tahun 2021 penyerapan penggunaan anggaran yang terdapat pada tabel varians belanja adalah sekitar Rp 24.541.130 atau sekitar 99%. Dalam hal ini ada pengurangan tingkat selisih sekitar 1% dari realisasi anggran yang ditetapkan pada tahun 2021. Terlihat kenaikan penggunaan anggaran 4% dari tahun sebelumnya jika diperhatikan pada tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Pada tahun 2022 penyerapan pengguna anggaran berdasarkan varians belanja sekitar Rp 807.085.061 atau sekitar 83%, dan jika melihat analisisnya kembali mengalami penurunan pemakaian anggaran. Penurunan sebesar 16% dari pengguna anggaran tahun sebelumnya, maka dengan itu kinerjanya masuk dalam kategori baik.

Jika dilihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dapat dikatakan penyerapan penggunaan anggaran sudah cukup efisien. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase varians belanja mencapai 94%.

$$\begin{aligned} \text{Total rasio varians belanja} &= \frac{22.603.634.326}{23.802.422.739} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

Kriteria varians belanja pada BAPPEDA Kabupaten Majene selama empat tahun dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 99%, sedangkan realisasi

terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 83%. Walaupun dalam melakukan analisis varians belanja, hendaknya tidak terpaku pada persentase penghematan yang berhasil dilakukan, tetapi juga jumlah nominalnya, dan walaupun secara persentase kecil, tetapi jika secara nominal cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Penyerapan anggaran yang terlalu rendah, misalnya dibawah 70% justru bisa dinilai jadi kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, misalnya banyak program yang tidak dijalankan. Dan penurunan penggunaan anggaran juga terjadi karena pembelanjaan yang tidak sepenuhnya memakai anggaran yang ada, oleh karena itu untuk menghindari kejadian tersebut pemerintah daerah perlu melakukan analisa standar belanja yang akurat

Secara umum, kinerja pemerintah akan terindikasi tidak baik jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Penghematan anggaran ditahun sekarang dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya.

## **2. Apakah Pengguna Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene telah memprioritaskan belanja dari tahun 2019-2022**

Analisis keserasian belanja dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka dianggap tidak baik. Jika belanja pegawai > 50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak baik, demikian pula sebaliknya.

Keserasian belanja diklarifikasikan menjadi dua yaitu, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil.

Analisis ini dapat dihitung dengan:

a. Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut:

1. Baik : Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung
2. Tidak Baik : Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung

**Tabel 4.5**  
**Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah**  
**BAPPEDA Kabupaten Majene**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2019	7.802.324.059	7.665.784.789	3.656.575.051	4.009.209.738
2020	5.051.620.209	4.816.914.997	3.358.075.060	1.458.839.936
2021	6.072.699.096	6.052.240.226	2.913.933.155	3.138.307.071
2022	4.875.779.375	4.068.694.314	2.812.240.170	1.256.454.144

*Sumber: BAPPEDA Kabupaten Majene*

Analisis ini dapat dihitung dengan:

a. Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut:

1. Baik : Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung
2. Tidak Baik : Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung

Rumus dan hasil perhitungan rasio belanja langsung adalah sebagai berikut berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Langsung} &= \frac{4.009.209.738}{7.665.784.789} \times 100\% \\ &= 52\% \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Langsung} &= \frac{1.458.839.936}{4.816.914.997} \times 100\% \\ &= 30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Langsung} &= \frac{3.138.307.071}{6.052.240.226} \times 100\% \\ &= 51\% \end{aligned}$$

Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Langsung} &= \frac{1.256.454.144}{4.068.694.314} \times 100\% \\ &= 30\% \end{aligned}$$

Perhitungan dengan rasio belanja langsung dengan berdasarkan pada tabel 4.5 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja**  
**Tahun Anggaran 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>Total Belanja</b>	<b>Rasio%</b>
2019	4. 009.209.738	7. 665.784.789	52%
2020	1. 458.839.936	4. 816.914.997	30%
2021	3. 138.307.071	6. 052.240.226	51%
2022	1. 256.454.144	4. 068.694.314	30%
<b>Total</b>	<b>9. 862.810.889</b>	<b>22. 603.634.326</b>	<b>43%</b>

Sumber: Data hasil olahan

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa analisis keserasian belanja jika dilihat dari belanja langsung terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kenaikan belanja langsung terhadap total belanja terjadi pada tahun 2019 dengan mencapai tingkat persentase tertinggi yaitu 52%, sedangkan penurunan belanja langsung terhadap total belanja terjadi pada tahun 2020 dan 2022 dengan tingkat persentase terendah yaitu sebesar 30%. Ditahun 2021 Analisis belanja langsung menunjukkan pada angka persentase sebesar 51% dari total anggaran Rp 6.052.240.226 dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan 21% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 4.068.694.314 dengan tingkat penurunan terendah sama halnya pada tahun 2020 yaitu 30%. Total keseluruhan pada tahun 2019-2022 belanja langsung adalah 43%.

$$\begin{aligned} \text{Total belanja langsung terhadap total belanja} &= \frac{22.603.634.326}{9.862.810.889} \times 100\% \\ &= 43\% \end{aligned}$$

#### b. Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis ini dilakukan untuk membandingkan belanja setiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja.

Rumus dan perhitungan rasio belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Tidak Langsung} &= \frac{3.656.575.051}{7.665.784.789} \times 100\% \\ &= 47\% \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Tidak Langsung} &= \frac{3.358.075.060}{4.816.914.997} \times 100\% \\ &= 69\% \end{aligned}$$

Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Tidak Langsung} &= \frac{2.913.933.155}{6.052.240.226} \times 100\% \\ &= 48\% \end{aligned}$$

Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Tidak Langsung} &= \frac{2.812.240.170}{4.068.694.314} \times 100\% \\ &= 69\% \end{aligned}$$

Perhitungan dengan rasio belanja tidak langsung dengan berdasarkan pada tabel 4.5 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja**  
**Tahun Anggaran 2019-2022**

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Rasio%
2019	3. 656.575.051	7. 665.784.789	47%
2020	3. 358.075.060	4. 816.914.997	69%
2021	2. 913.933.155	6. 052.240.226	48%
2022	2. 812.240.170	4. 068.694.314	69%
<b>Total</b>	<b>12. 740.823.436</b>	<b>22. 603.634.326</b>	<b>56%</b>

*Sumber: Data hasil olahan*

Pada tahun 2019 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung berada pada persentase 47% dengan total belanja sebesar Rp 7. 665.784.789, pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung yaitu sekitar 69% dengan total belanja sebesar Rp 4. 816.914.997, dan pada tahun 2021 total belanja yang terdapat pada belanja tidak langsung kembali mengalami penurunan, yaitu sekitar 48% atau sebesar Rp 6. 052.240.226, tetapi pada tahun 2022 total belanja yang terdapat pada belanja tidak langsung kembali mengalami kenaikan persentase yang sama pada tahun 2020 yaitu 69%.



Dapat dilihat jika perubahan dan struktur total belanja tidak langsung begitu banyak mengalami penurunan dan kenaikan angka persentase disetiap tahunnya. Perubahan rasio terlihat cukup jauh setiap tahun, dengan begitu dapat dikatakan dari tahun 2019 sampai 2022 tidak tetap selalu ada perubahan pertahunnya, dan total persentase belanja seluruhnya dari tahun 2019-2022 yaitu 56% atau sebesar Rp 12.740.823.436.

$$\text{Total belanja tidak langsung terhadap total belanja} = \frac{22.603.634.326}{12.740.823.436} \times 100\% = 56\%$$

**Tabel 4.8**  
**Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**Tahun Anggaran 2019-2022**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Belanja Langsung (%)</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (%)</b>	<b>Total (%)</b>
<b>2019</b>	52%	47%	<b>100</b>
<b>2020</b>	30%	69%	<b>100</b>
<b>2021</b>	51%	48%	<b>100</b>
<b>2022</b>	30%	69%	<b>100</b>
<b>Total</b>	<b>43%</b>	<b>56%</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Hasil Olahan*

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 penggunaan anggaran terfokus pada belanja tidak langsung. Dimana belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tahun 2019 pengguna pada alokasi pembiayaan belanja tidak langsung sebesar 47% atau sekitar Rp 3.656.575.051, dengan total persentase untuk belanja langsung sebesar 52% atau sekitar Rp 4.009.209.738, dari total anggaran belanja. Pada tahun ini keserasiannya dikatakan baik, karena persentase belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung.

Tahun 2020 pengguna pada alokasi pembiayaan tidak langsung mengalami kenaikan menjadi 69% atau sekitar Rp 3.358.075.060 yang diikuti dengan kenaikan total anggaran. Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung berada pada persentasenya sebesar 30% atau sekitar Rp 1.458.839.936. Pada tahun ini mengalami penurunan pada persentase belanja langsung sehingga dapat dikatakan tidak baik karena belanja langsung lebih kecil dari pada belanja tidak langsung

Tahun 2021 pengguna alokasi belanja tidak langsung mengalami penurunan dengan persentase sebesar 48% atau sekitar Rp 2.913.933.155, sedangkan untuk alokasi belanja langsung mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 51% atau sekitar Rp 3.138.307.071. Jika dilihat dari kriteria analisis keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka pada tahun ini dapat dikatakan baik dalam hal penggunaan anggaran.

Tahun 2022 pengguna alokasi belanja tidak langsung mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 69% atau sekitar Rp 2.812.240.170 dari total belanja. Sedangkan untuk alokasi belanja langsung kembali mengalami penurunan pada tahun ini dengan persentase sebesar 30% yang cukup jauh dengan angka persentase anggaran pada tahun sebelumnya, maka dengan itu pada tahun ini keserasian belanja dapat dikatakan tidak baik, karena belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung.

Penggunaan pada pembiayaan belanja langsung sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran pertahunnya, karena belanja ini sangat berhubungan langsung dengan kegiatan operasional instansi. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa selama empat tahun anggaran, pengguna anggaran dapat dinilai baik pada tahun 2019 dan 2021 dan selama dua tahun yaitu 2020 dan 2022 dinilai tidak baik, karena persentase belanja tidak langsung lebih tinggi dari pada persentase belanja langsung. Berarti dalam hal ini pengguna anggaran di BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari total keseluruhan persentase keserasian belanjanya dapat dikatakan tidak baik dalam pengguna anggaran belanjanya karena masih terfokus kepada belanja tidak langsung

### 3. Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah atas Kinerja Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene

#### a) Prinsip *Amar ma'ruf Nahi mungkar*

Arti *Amar ma'ruf Nahi mungkar* secara terminology adalah mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang munkar. Secara etimologi *amar* adalah perintah, ajakan, anjuran, himbauan bahkan juga berarti permohonan, *ma'ruf* artinya baik, layak, patut, *nahi mungkar* berarti melarang, mencegah, dan *mungkar* berarti durhaka.

*Amar ma'ruf Nahi mungkar* juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang munkar. Istilah di dalam syariat islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat.

#### b) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Kewajiban menegakkan kebenaran dalam manajemen keuangan syariah yaitu kita dituntut untuk berperilaku jujur dalam menjalankan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan berperilaku jujur salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:8.<sup>62</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى  
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat

<sup>62</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>63</sup>

### 3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Keadilan dalam hukum islam meliputi berbagai aspek kehidupan, hubungan manusia dengan tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>64</sup>

### 4) Kewajiban Menegakkan Amanah

Amanah yaitu dapat dipercaya, pekerjaan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota dan atasan tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. Al-Anfural/8:27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>63</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

<sup>64</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.<sup>65</sup>

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Ringkasan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

### **Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene**

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
1.	Rasio Efektivitas Belanja	94%
2.	Rasio Efisiensi Belanja	43%
3.	Rasio Varians Belanja	94%
4.	Rasio Keserasian Belanja	
	a. Belanja Langsung	43%
	b. Belanja Tidak Langsung	56%

Sumber : Data Hasil Olahan

### **1. Apakah Kinerja Keuangan Berdasarkan Realisasi Anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Majene dari Tahun 2019-2022**

a.) Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Efektifitas Belanja

Hasil perhitungan analisis efektivitas belanja, maka dapat dilihat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, BAPPEDA Kabupaten Majene sudah melakukan penggunaan anggaran dengan efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya berada pada kisaran 90-100%. Jika dilihat dari tingkat kriterianya maka pengguna anggaran selama empat tahun anggaran tersebut sudah efektif, hal ini dapat diartikan manajemen penyusunan anggaran di BAPPEDA Kabupaten Majene sudah mencapai tujuan dan target realisasinya

<sup>65</sup>*Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.*

dimana semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud. Batas atas anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dari sasaran seperti apa yang direncanakan, dimana tingkat rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 99% dan rasio terendah pada tahun 2022 sebesar 83%

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Budianto pada pemerintah Kabupaten Magelang yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan dengan hasil yang sangat Efektif karena sudah sangat baik dalam pengelolaan manajemen penyusunan anggarannya seperti yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Majene.

b.)Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja

Penilaian analisis efisiensi belanja dapat dikatakan bahwa BAPPEDA Kabupaten Majene sudah melakukan penggunaan anggaran yang sangat efisien. Dapat dilihat dari total keseluruhan analisisnya selama empat tahun yaitu sebesar 43% ditunjukkan dengan kriteria efisiensi kurang dari 60% yaitu sangat efisien. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya angka diatas 60% yang melebihi anggaran belanja, untuk hal ini BAPPEDA Kabupaten Majene sudah cukup melakukan penghematan anggaran selama empat tahun anggaran, hal ini dapat diartikan bahwa BAPPEDA Kabupaten Majene sudah efisien dalam realisasi anggaran perencanaan pembangunan daerahnya karena dalam proses penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah BAPPEDA selalu melakukan servei langsung dengan masyarakatnya mengenai perbaikan pembangunan apa yang mereka butuhkan dan tentunya hasil dari musyawarah Organisasi Perangkat Daerah mereka masing-masing.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Budianto pada pemerintah Kabupaten Magelang yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan dengan hasil yang Efektif karena sudah cukup dalam melakukan penghematan anggarannya seperti yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Majene, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Halkadri Fitra atas pengukuran kinerja keuangan di Kabupaten Solok Selatan yang

mendapatkan hasil yang kurang efisien, hal menandakan kurangnya penghematan anggaran yang dilakukan selama tahun anggaran yang telah direncanakan

c.) Kinerja Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari Rasio Varians Belanja

Kinerja keuangan belanja daerah BAPPEDA Kabupaten Majene tahun 2019-2022 dilihat dari varians belanja daerah, secara umum dapat dikatakan baik, karena ada hasil negatif yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran, ditunjukkan dengan total perbandingan sebesar 94%, dan juga realisasi belanja tidak melebihi dari apa yang sudah dianggarkan. Hal ini dapat diartikan tidak ada indikasi dari kinerja keuangan belanja daerah yang kurang baik atau tidak adanya jumlah realisasi belanja yang lebih besar dari jumlah anggaran yang ditargetkan. Penyebab terjadinya penghematan anggaran adalah karena realisasi anggaran tidak melebihi dari apa yang dianggarkan, sehingga sisa penghematan ini dapat digunakan untuk tahun yang akan datang. Sedangkan dampaknya adalah tidak menghabiskan APBD.

## **2. Apakah Pengguna Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene telah Memprioritaskan belanja dari tahun 2019-2022**

Analisis keserasian belanja daerah menunjukkan bahwa jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung dianggap tidak baik. Dan jika belanja pegawai lebih besar dari 50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan juga anggaran belanja tidak baik. Analisis keserasian belanja daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selama tahun 2019-2022 rata-rata belanja tidak langsung sebesar 56%. Sedangkan untuk total belanja langsung sebesar 43%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dilihat dari analisis keserasian belanjanya lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk biaya belanja tidak langsung, dimana belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.



Analisis keserasian belanja pada BAPPEDA Kabupaten Majene jika dilihat selama empat tahun anggaran, mengalami dampak yang tidak baik selama 2 tahun yaitu tahun 2020 dan 2022, hal ini dikarenakan pengguna anggaran lebih terfokus kepada belanja tidak langsung. Sementara pada tahun 2019 dan 2021 pengguna anggaran terlihat baik, karena BAPPEDA Kabupaten Majene memberikan perhatian anggarannya terhadap belanja langsung, dimana pada tahun ini terjadinya penghematan anggaran terhadap belanja tidak langsung guna keperluan belanja langsung. Namun jika dilihat total keseluruhannya BAPPEDA Kabupaten Majene dikatakan tidak baik dalam penggunaan anggaran khususnya terhadap keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dampaknya jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah yang berakibat berkurangnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat ataupun terhadap program kegiatan instansi. Dan adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah. Dan kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan yang relatif besar. Seperti: pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan masjid, dll. Kenaikan belanja tidak langsung memberikan dampak negative terhadap pembangunan daerah karena lebih memfokuskan kepada penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halkadri Fitrah dan Zahro Ilmi Efendidi Kabupaten Solok selatan dengan fokus penelitian kinerja keuangan pada realisasi anggarannya sama-sama kurang baik karena realisasi belanja tidak langsung melebihi belanja langsung meskipun tidak berdampak langsung dengan program/kegiatan yang dilakukan tetapi hal ini harus menjadi evaluasi agar kedepannya Perencanaan Anggaran lebih baik lagi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Halkadri Fitra, Zahro Ilmi Efendi, “*Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan*” xiv, no. 01 (2020).



Solusi dalam mengatasi dampak tersebut adalah perlunya dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung guna dialokasikannya untuk keperluan belanja langsung. Serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas.

### 3. Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah atas Kinerja Anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene

Berdasarkan hasil kinerja keuangan yang diperoleh, kinerja keuangan mempunyai implikasi terhadap manajemen keuangan syariah. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam menganjurkan orang beramal dan berusaha, dalam hal ini para pebisnis atau penguasa perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam menjalankan pekerjaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah diantaranya adalah:

#### a) Prinsip *Amar ma'ruf Nahi mungkar*

*Amar ma'ruf Nahi mungkar* adalah mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk, artinya dalam melakukan pekerjaan hendaklah seseorang melakukannya dan mengajak rekannya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh menghindari hal-hal yang buruk agar kinerja yang dicapai dapat maksimal, sebagaimana pada Firman Allah swt Q.S. Ar-Rad/13:11.<sup>67</sup>

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka

<sup>67</sup>*Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.*

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya: dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Ayat diatas menjelaskan bahwa suatu keadaan yang kita hadapi tidak berubah dengan sendirinya melainkan kita yang mengubahnya sendiri baik itu buruk maupun baik. Sesuatu yang kita kerjakan buruk maka keburukan pula yang akan kita dapat. Maka suatu kinerjapun demikian apabila kinerja keuangan perusahaan itu baik maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan.

#### b) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Kewajiban menegakkan kebenaran dalam manajemen keuangan syariah yaitu kita dituntut untuk berperilaku jujur dalam menjalankan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan berperilaku jujur salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:8.<sup>68</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى  
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menekankan kepada semua orang agar senantiasa menegakkan kebenaran, begitupun dalam membuat dan menyusun laporan keuangan diperlukan kebenaran data atau data valid yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar dalam mengukur kinerja keuangan didapatkan hasil yang besar tanpa adanya kecurangan dalam pemalsuan data atau angka, maka dari itu baik dalam bekerja atau mengukur kinerja keuangan perusahaan diperlukan senantiasa sikap yang selalu menjunjung tinggi prinsip

<sup>68</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

kebenaran, senantiasa menegakkan kebenaran dalam kehidupan akan menjadi jalan untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah swt.

#### c) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Prinsip keadilan ini sejalan dengan manajemen keuangan syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S. Asy-Syu'ara/26:181-183.<sup>69</sup>

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ  
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Ayat diatas menekankan kepada semua orang agar senantiasa menegakkan keadilan dengan menyempurnakan timbangan atau pengukuran harus secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi, begitupun dalam mengukur atau menilai kinerja keuangan diperlukan analisis yang adil dalam mendiskripsikan kondisi perusahaan tersebut, maka dari itu setiap orang yang menganalisis perusahaan seseorang memiliki kewajiban untuk mendiskripsikan dan mengukurnya harus secara jelas sehat atau tidaknya perusahaan tersebut karena pemilik perusahaan berhak untuk mengetahui kendala apa yang terjadi pada perusahaannya di periode sebelumnya serta langkah apa yang harus diambil sebagai evaluasi di periode kedepannya.

#### 4) Kewajiban Menegakkan Amanah

<sup>69</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

Amanah yaitu dapat dipercaya, pekerjaan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota dan atasan tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/8:27.<sup>70</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.<sup>71</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perlu amanah dalam kehidupan, begitupun dalam kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan dijadikan pertanggungjawaban setiap tahun. Maka dari itu laporan keuangan harus berisi data yang benar agar menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan tersebut.

Pengelolaan Anggaran di BAPPEDA Kabupaten Majene selama empat tahun initalah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam perencanaan anggarannya memprioritaskan percepatan pemulihan ekonomi yaitu tahun 2019-2022 sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga keadilan, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, berkepihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menaggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap berbagai pelayanan sosial dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

<sup>70</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

<sup>71</sup>Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio varians belanja, Kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dapat dikatakan baik dapat dilihat dari hasil perhitungan tiga rasio yaitu: rasio efektivitas belanjanya selama empat tahun 2019-2022 sudah efektif, dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya adalah sebesar 94%. Adapun kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi belanja daerah, bahwa realisasi anggaran belanja BAPPEDA tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Majene telah melakukan efisiensi belanja, dapat dilihat dari rata-rata perhitungan yaitu sebesar 43%, dan kinerja keuangan dilihat dari rasio varians belanja dari tahun 2019-2022 secara umum dapat dikatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi sebesar 94% yang diartikan bahwa tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja.
2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung, dan sisanya untuk belanja langsung. Selama empat tahun anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene dinilai tidak baik dalam penggunaan anggarannya pada tahun 2020 dan 2022, karena pada kedua tahun ini BAPPEDA Kabupaten majene cukup besar tidak memprioritaskan belanja langsung. Sementara pada tahun 2019 dan 2021 penggunaan anggaran BAPPEDA Kabupaten majene dikatakan baik karena telah memprioritaskan belanja langsungnya yaitu yang berkaitan langsung dengan program-program yang telah dianggarkan dan telah melakukan penghematan terhadap belanja tidak langsung.

3. Berdasarkan tinjauan manajemen keuangan syariah realisasi kinerja anggaran BAPPEDA Kabupaten Majene menunjukkan sudah sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah yaitu prinsip Amar ma'ruf Nahi mungkar, Kewajiban Menegakkan Kebenaran, Kewajiban Menegakkan Keadilan, dan Kewajiban Menyampaikan Amanah, dalam menyusun laporan keuangan termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperlukan kebenaran data atau data valid yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar mengukur kinerja keuangan didapatkan hasil yang benar tanpa adanya kecurangan dengan tidak dilebihkan dan jangan dikurangi agar tergambar jelas sehat atau tidaknya perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dan serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti membarikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Bappeda Kabupaten Majene adalah:
  - a. Penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan alat analisis menunjukkan bahwa penyerapan kinerja anggaran yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Majene sudah memenuhi syarat efektivitas, efisiensi, dan varians belanja yaitu pengguna dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, terutama bagi perencanaan dan pembangunan daerah.
  - b. Dari analisis keserasian belanja dapat disarankan, perlu adanya perhatian khusus dari instansi BAPPEDA Kabupaten Majene dalam penggunaan anggaran belanja terhadap belanja langsung. Dimana belanja langsung ini sangat berperan terhadap kegiatan operasional instansi. Dan sebaliknya BAPPEDA Kabupaten Majene dapat mengoptimalkan kinerja instansinya dengan mengalokasikan pengguna anggaran pada pembiayaan belanja langsung, karena ini sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran.

2. Bagi Penelitian selanjutnya, Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2019-2022, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene dan penelitian selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alba, Refo Aulia, 2022. *Indikator Ekonomi Kabupaten Majene Tahun 2022*, Majene: BPS Kabupaten Majene.
- Ali, Zainuddin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, 2009. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi, 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kabupaten Majene, 2023. *Statistik Daerah Kabupaten Majene 2023*, Majene: BPS Majene.
- Budianto, Arif, 2021. *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020*, Magelang : Pusaka Magelang go.id.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Soasial lainnya*, Jakarta : Prenda Media grup.
- Ekonomi Internasional. "Teori dan Kebijakan Oleh Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld", Salemba Empat: 2015.
- Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fitra, Halkadri, et al., ds, 2020. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan*.
- Gusman, Muh Ilham 2021. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Parepare*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIEN Parepare,
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Ikhsan Arfan, et al., eds. 2012, "Analisis Laporan Keuangan", Medan: Madanetra.
- Ikhsan, Arfan, 2008. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA

M.P, Todaro dan Smith, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* Erlangga: 2017.

Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2.

Mangkunegara, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Remaja Rodaskarya.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.

Margono, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad, 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

N.G, Mankiw, *Pengantar Teori Ekonomi Salemba Empat*: 2015.

Nordiawan, Dedi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.

Perpustakaan Nasional, 2010. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya).

Pilat, Juddy Julian, 2017. *Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, kota manado tahun anggaran 2011-2021*. 6.1

Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi

Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2006.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 2014.

Rachman, Aditya Kusuma, et al., ds, 2023. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Maranti Tahun Anggaran 2017-2021*.

S, Frederic Teori Moneter: Pengantar. Salemba Empat: 2016.

- Silalahi Syahputra, Berlin Dhamos, 2023. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi,
- Sinurat, Marja, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Bandung: Pustaka Rahmat
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarjono, Hendro, 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syam Kusufi, Abdul Halim, 2012. *Teori, konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, (Jagakarsa: Salemba Empat).
- Syamsi, Ibnu, 2013. *Pokok-pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Jakarta: CV Rajawali.
- Sule, Erni Tisnawati. et al., eds, 2006, *Pengantar Manajemen*, Jakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2006. *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi* Bandung: Alfabet.
- Taringan, Wico Jontarudi, et al., eds, 2023. *Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar*.
- Wirawan, 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zubair, Muhammad Kamal, et al., eds, 2020. *PENULISAN KARYA ILMIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.



## LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.80/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024 08 Januari 2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)  
**2. Ismayanti, M.M.** (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Siti Nurfatirah Ismail  
 NIM. : 2020203861211051  
 Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal **11 Desember 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP EFEKTIFITAS DAN  
 EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH KABUPATEN MAJENE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 197112082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1203/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

17 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE  
Cq. Badan Kesbangpol Majene  
di  
KAB. MAJENE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SITI NURFATIRAH ISMAIL
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 01 Mei 2003
NIM	: 2020203861211051
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DESA AWANG-AWANG, KELURAHAN SIPATOKKONG, KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1203/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

17 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. MAJENE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SITI NURFATIRAH ISMAIL
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 01 Mei 2003
NIM	: 2020203861211051
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DESA AWANG-AWANG, KELURAHAN SIPATOKKONG, KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/166/V/2024

1. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
  4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
  2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1230/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024 Tanggal 17 April 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SITI NURFATIRAH ISMAIL  
Nim : 2020203861211051  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Awang-Awang Desa Sipatokkong Kcc. Watang Sawitto Kab. Pinrang

Untuk melakukan Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene Mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan Proposal berjudul ;

**“ ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 14 Mei 2024

An. Kepala Badan

Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan



**RAHMAT AHMAD, S.Sos**

Pangkat: Penata Tk. I / III.d

NIP : 19700712 200902 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM-PTSP)**

Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 500 16.7.2/163/IPN/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/166/N/2024 Tanggal 17 April 2020 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: SITI NURFATIRAH ISMAIL
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 2020203861211051
Program Study/Jurusan	: S1 Manajemen Keuangan Syariah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat	: Awang-Awang Desa Sipatokkong Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
 Pada Tanggal : 16-05-2024  
 Kepala Dinas /



**NI LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda  
 Nip. 196809281992032011





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(BAPEDA)

Jl. Jend. Gatot Subroto No 12 Majene Tlp 0422-21514

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050.13/098/2024

Yang dibawah ini kepala Dinas BAPEDA Kab. Majene menerangkan bahwa :

Nama : SITI NURFATIRAH ISMAIL  
Nim : 2020203861211051  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah  
Program : Strata Satu (S1)

Benar yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian pada Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) yang dilaksanakan dari tanggal 18 April s.d 18 Juni 2024 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**“ ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE “**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 14 Mei 2024

an. Kepala Bapeda  
Kabupaten Majene dan Kepegawaian



## DOKUMENTASI

**Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala BAPPEDA Kabupaten Majene**



**Pembahasan Laporan Keuangan (LRA) bersama Kepala Bidang Keuangan BAPPEDA Kabupaten Majene**



## BIOGRAFI PENULIS



**Siti Nurfatirah Ismail**, penulis lahir di Pinrang, 01 Mei 2003. Anak kedua dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan bapak Ismail dan Ibu Murni. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kanni, Kecamatan Paleteang, Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar 2008 dan kemudian melanjutkan pendidikan sekoah menengah SMP Al-mazakhirah Baramuli pada tahun 2014. Penulis lalu melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun 2017.

Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang menengah atas, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya dibangku perkuliahan Institut Agama Islam Negeri (IAIEN) Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah tahun 2020. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Penulis mengajukan skripsi sebagai tugas akhir menyelesaikan pendidikan di jenjang perkuliahan dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene”**. Akhir kata , penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt, dan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pendidikan.